



Judul : Tim Internal Bantu Komite Reformasi Polri
Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Tim Internal Bantu Komite Reformasi Polri

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Tim Transformasi Reformasi Polri dari internal akan melakukan persiapan persiapan membantu Komite Reformasi Polri.

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan DPR memintai Polri untuk bersinergi dengan pihak independen dalam upaya mereformasi Polri. Reformasi institusi penegak hukum ini juga bakal berdampak pada pembahasan revisi Undang-Undang Polri.

Di tengah upaya reformasi kepolisian yang dicanangkan pemerintah, Polri terlebih dahulu membentuk Tim Transformasi Reformasi Kepolisian yang sudah dibentuk Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo pada 17 September 2025 tersebut diisi oleh 52 perwira polisi. Ke-52 orang itu terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah yang dipimpin Kepala Lembaga Didik Polri Komisaris Jenderal Chrysanthiana Ewilaksana.

Melalui surat perintah, Kapolri menugaskan para personel di dalam dan di luar undang-undang dan bekerja sama dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan tugas sebagai Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim juga diminta menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan serta melaksanakan perintah dari Kapolri dengan saksama dan penuh tanggung jawab.

Selain itu, kalangan merespons negatif pembentukan Tim Transformasi Reformasi Kepolisian yang semuanya dari internal Polri tersebut. Sentimen negatif dari publik tergambar dari respons di dunia maya. Bahkan, koalisi masyarakat sipil juga khawatir pembentukan tim ini sarat konflik kepentingan.

Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memepis anggapan Tim Transformasi Reformasi Kepolisian bakal bertentangan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang terdiri atas pihak luar institusi. Dia menyebut, tim internal Polri itu akan memberikan masukan terhadap komite tersebut.

"Jadi, Tim Transformasi Reformasi Polri yang dari internal itu untuk kemudian melakukan persiapan persiapan membantu Komite Reformasi. Membantu yang dari luar di dalam. Jadi, kalau ada yang bilang itu bertentangan, itu salah. Sebab, itu persiapan untuk membantu Komite Reformasi," ujar Dasco saat ditemui di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Dasco juga menyebut, komite tersebut akan diisi tokoh-tokoh yang kredibel, salah satunya Mahfud MD. Dasco menilai, rekam jejak Mahfud cocok untuk memperbaiki kepolisian sesuai dengan tuntutan publik.

"Pak Mahfud, kan, tokoh yang kredibel. Dia pernah jadi Menko Polkam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), dan dia memahami itu. Selain itu? Saya enggak tahu," kata Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saad Mastopa mengingatkan, tim reformasi dari Polri agar bersinergi dengan komite berbentuk pemerintah. Hal tersebut dibutuhkan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dari institusi penegak hukum ini.

"Salah bersinergi, saling menguatkan. Karena semangatnya sama, bagaimana institusi kepolisian menjadi lebih profesional, lebih transparan, menjadi lebih akuntabel. Tentu nanti, dari hasil tim reformasi yang dibentuk kepolisian itu sendiri, akan membuka ruang, membuka diri untuk tim reformasi yang sifatnya independen, ya," kata Saad.

RUU Polri

Suara melanjutkan, semangat reformasi kepolisian ini juga akan berdampak pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Polri. Evisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dari usulan Komisi III DPR.

Meskipun demikian, peluang untuk pembahasan berlanjut di tahun depan terbuka lebar karena masuk dalam RUU Lun-curan pada Prolegnas Prioritas 2025. Namun, Saad tidak mem-betulkan lebih lanjut kapan pembahasan RUU Polri ini ber-gulir.

"Hasil hasil itu (reformasi kepolisian) nanti bisa menjadi bahan ketika pembahasan terkait RUU Kepolisian. Bisa menjadi masukan, pertimbangan untuk substansi di dalam RUU Kepolisian itu sendiri. Tentu semangatnya sama, yaitu profesionalisme, akuntabilitas, dan keterbukaan," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Dasco. Dia menekankan, substansi terkait RUU Kepolisian akan menunggu hasil dari reformasi kepolisian. "Kita tahu (substansi RUU Polri). Kan, kami lagi tunggu juga ini, hasil Komite Reformasi tadi itu," ujar Dasco.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah mendukung pembentukan Tim Transformasi Reformasi Kepolisian yang dibentuk Kapolri. Langkah itu merupakan momentum penting untuk membenahi berbagai persoalan internal Polri.

Abdullah berharap Tim Transformasi Reformasi Polri dijalankan dengan serius. Keseriusan itu dibutuhkan karena Polri menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Kami mendukung penuh Tim Transformasi Reformasi Polri. Namun, saya ingin mengingatkan, jangan sampai hanya berfungsi sebagai kosmetik kelembagaan, sekadar pencitraan," katanya.

Perbaikan nyata

Lebih lanjut lagi, Abdullah

mengingatkan hasil kerja Reformasi Polri harus ada implementasi nyata dalam bentuk kebijakan, prosedur, hingga budaya kerja bars di tubuh Polri.

"Yang dibutuhkan masyarakat adalah perbaikan nyata dalam tubuh Polri," ujarnya.

Polri pun diingatkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses reformasi kepolisian. Keterlibatan publik penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas sekaligus memperkuat legitimasi hasil kerja Tim Transformasi Reformasi Polri.

Tim tersebut juga dituntut untuk bekerja profesional. Apalagi, Abdullah mengingatkan, kasus-kasus pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, serta perilaku aparat yang tidak profesional menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Partisipasi publik

Oleh karena itulah, menurut Abdullah, tim reformasi Polri itu penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses reformasi kepolisian. Dia juga mengingatkan Polri untuk mengundang pihak luar dan dituntut bekerja profesional.

"Polri harus membuka diri terhadap masukan dari masyarakat. Undang-undang para pakar, akademisi, koalisi masyarakat sipil, tokoh ormas, mahasiswa, serta masyarakat luas. Dengan begitu, proses reformasi tidak hanya menjadi agenda internal, tetapi juga gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa," ujar Abdullah.

Partisipasi publik justru akan membantu Polri memahami ekspektasi dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Jika masukan dari masyarakat benar-benar diperhatikan, arah reformasi akan lebih sesuai dengan harapan publik, bukan sekadar sesuai dengan kepentingan internal kepolisian.

Menurut Abdullah, hal itu yang akan membuat kepercayaan masyarakat kembali pulih. Ia juga menegaskan, hasil kerja Tim Reformasi Polri nantinya tidak boleh berhenti di atas kertas atau sebatas rekomendasi.

Hal yang paling penting adalah implementasi nyata. "Kita ingin ada perubahan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan yang lebih humanis, penegakan hukum yang adil, hingga peningkatan profesionalitas aparat di lapangan," kata Abdullah.

Abdullah pun mengajak seluruh jajaran Polri untuk menjadikan momentum reformasi ini sebagai jalan menuju transformasi yang lebih mendasar. Ia meyakini, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan melibatkan banyak pihak, Tim Transformasi Reformasi Polri dapat menjadi motor perubahan yang membawa institusi kepolisian lebih dipercaya dan dicintai masyarakat.

(DYT/RTC)